



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOBY ALI AZHARI**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **860560**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.325.000.000
1. Tanah Seluas 222 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
3. Bangunan Seluas 28.73 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000		
5. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	305.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY/SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2023, WARISAN Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.335.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	70.457.834
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.229.857.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	7.265.315.334



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.265.315.334

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.